

**JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN** is Indonesian Law Journal published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang. This journal specializes in Legal Studies and try to present various results of the latest and high-quality scientific research. All articles must be written in English or Indonesia. This journal is published twice a year in June and December.

**JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN** has been indexed at Portal Garuda, Google Scholar, Research Gate, Dimension, and become a CrossRef Member since year 2021. Therefore, all articles published by this journal will have unique DOI number.

#### **EDITORIAL ADVISORY**

Prof Efa Laela Fakhriah, SCOPUS ID: 57210644820. SINTA ID: 6037589. Department of Law. Pajajaran University. Bandung, Indonesia.

Prof Kurnia Warman, SCOPUS ID: 57204331549. Orcid ID: 0000-0002-1260-0877. SINTA ID: 6032209. Department of Law. Andalas University. Padang, Indonesia

Prof Agus Yudha Hermoko, SCOPUS ID: 57201692450. SINTA ID: 5987115. Department of Law. Airlangga University. Surabaya, Indonesia

Prof Joni Emirzon, SCOPUS ID: 57194063764. SINTA ID: 6066385. Department of Business Law. Faculty of Law. Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Prof Erina Pane, SCOPUS ID: 57221375704. SINTA ID: 6017986. Department of Islamic Law. State Islamic University of Raden Intan. Lampung, Indonesia

Prof Tata Wijayanta, SINTA: 6017938. Department of Law. Gajah Mada University. Yogyakarta, Indonesia.

Prof Sunarmi Sunarmi, SINTA ID: 6127919. Department of Law. Sumatera Utara University. Medan, Indonesia

Prof Rahayu Hartini, SINTA ID: 5991951. Department of Law. Muhammadiyah University of Malang, Indonesia

Prof Suhaidi Suhaidi, SINTA ID: 6087406. Department of Law. Sumatera Utara University. Medan, Indonesia

Prof Romli SA, SINTA ID: 6219283. Department of Islamic Law. State Islamic University of Raden Fatah. Palembang, Indonesia

Nur Rohim Yunus, SCOPUS ID: 57216167775, Web of Science ResearcherID: AAI-6738-2020. Department of Constitutional Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Nur Husni Emilson, SINTA ID: 6038456. Department of Law. Faculty of Law. Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

#### **EDITOR IN CHIEF**

**Serlika Aprita**, SINTA ID: 6712192. ORCID ID: 0000-0003-1391-8008. Department of Law. Faculty of Law. Universitas Muhammadiyah Palembang., Indonesia

#### **MANAGING EDITOR**

**Sarah Qosiim**, ORCID ID: 0000-0002-0925-570X. Department of Islamic Law. Faculty of Law. Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

#### **EDITORS:**

**Dea Justicia Ardha**, SINTA ID: 6756815. Department of Civil Law. Faculty of Law. Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

**Febrina Hertika Rani**, SINTA ID: 6756756. Department of Criminal Law. Muhammadiyah University of Palembang. Palembang, Indonesia

**Syahriati Fakhriah**, SINTA ID: 6735111. Department of Law. Muhammadiyah University of Palembang. Palembang, Indonesia

#### **TECHNICAL TEAM:**

**Siti Azizah**, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

**Kurnia Febri Yanti**, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

#### **Address**

JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN

Faculty of Law, Muhammadiyah University of Palembang. Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Seberang Ulu II, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30263. Contact Person: 0857-7843-5737.

E-mail: [jurnal.khk@um-palembang.ac.id](mailto:jurnal.khk@um-palembang.ac.id). Website: <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/index>

Jurnal  
**KEPASTIAN HUKUM  
DAN KEADILAN**

Welcoming contributions from scientists, scholars, professionals, and researchers in the legal disciplines to be published and disseminated after going through script selection mechanisms, reviewing sustainable partners, and rigorous editing processes.

# TABLE OF CONTENTS

## EDITORIAL:

### **Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan**

*Serlika Aprita*..... i-vi

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir**

*Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indraajaja,  
Syafii*..... 1-16

### **Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan**

*Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan* ..... 17-30

### **Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan**

*Yudistira Rusydi*..... 31-44

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia**

*Erisa Ardika Prasada* ..... 45-54

### **Dampak Undang-Undang cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Undang- Undang Administrasi Pemerintahan**

*Edy Kastro, Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati* ..... 55-64

### **Eksistensi Hukum Waris Adat Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur**

*Agustina Dua Osa, Gustav Gisele Nuwa, Abdul Muis Kasim*..... 65-74

## Kata Kunci bersumber dari artikel

**Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indradjaja, Syafii**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir**

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 h. 1-16

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang putus hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir dengan menggunakan logika berpikir *deduktif* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berpijak pada konsep-konsep penormaannya, pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang telah ada dengan bahan hukum yang diakses melalui internet pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun hasil penelitian menunjukkan kewajiban konstitusional pemerintah tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara, namun juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dalam konteks perlindungan atas hak-hak pekerja yang putus hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir adalah jika pemutusan hubungan kerja atas kehendak pengusaha, maka pengusaha berkewajiban membayar ganti rugi kepada pekerja berupa upah yang besarnya dihitung sejak diputus hubungan kerja sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan begitu juga sebaliknya jika pemutusan hubungan kerja atas kehendak pekerja maka pekerja wajib membayar kepada pengusaha berupa ganti rugi yang besarnya sejumlah upah yang akan diterima pekerja sejak kehendak pemutusan hubungan kerja sampai dengan berakhirnya masa kontrak serta pengusaha wajib membayar kompensasi kepada pekerja atas pemutusan hubungan kerja tersebut sejak perjanjian kerja waktu tertentu telah dilaksanakan oleh pekerja.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja

**Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indradjaja, Syafii**

### **Legal Protection for Workers Who Terminate Employment Relations Before the End of the Employment Contract Period**

*Journal of Legal Certainty and Justice* Vol. 4 No. 1 p. 1-16

*This research is a conceptual study that aims to analyze the form of legal protection for workers who break their employment before the contract period ends by using the logic of deductive thinking with a statutory approach (statute approach), by relying on the concepts of its incarnation, views or doctrines that have existed with legal materials accessed through the internet after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The results show that the government's constitutional obligation not only provides the widest possible employment for citizens, but also obliges to provide legal protection to every citizen to get fair treatment in the employment relationship. In the context of the provision of the rights of workers who break the employment relationship before the contract period ends is if the termination of employment at the will of the employer, then the employer is obliged to pay compensation to the worker in the form of wages whose amount is calculated from the termination of the employment relationship until the end of the contract period and vice versa if the termination of employment on the will of the worker then the worker must pay to the employer in the form of compensation in the amount of wages that will be received by workers from the will of termination of employment until the expiration of the contract period and the company is obliged to pay compensation to workers for the termination of the employment since a certain time employment agreement has been implemented by the worker.*

**Keywords:** Legal Protection, Contract Worker, Termination of Employment

**Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan**

### **Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif**

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 h. 17-30

Tujuan pemdanaan telah bergeser dari teori pembalasan (retributif) menuju ke keadilan berbasis pemulihan

(keadilan restoratif). Keadilan restoratif adalah tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana. Selain berfokus pada korban, keadilan restoratif juga bertujuan untuk mengupayakan penyelesaian yang terbaik bagi korban kejahatan, dan pelaku, serta keluarga pelaku maupun keluarga korban. Salah satu mekanisme yang ditempuh untuk mewujudkan keadilan restoratif adalah dengan mediasi penal. Artikel ini akan membahas terkait dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan. Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan koseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya aturan yang tertulis, jelas dan tegas mengenai mediasi penal, dan pemberlakuan mediasi penal dalam tindak pidana ringan akan membawa kemanfaatan yakni menghindarkan pelaku dari dampak negative dari pemidanaan, memulihkan korban, dan mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Mediasi Penal; Perkara Pidana

**Kristiyadi, Vincentius Patria Setyawan**

***Penal Mediation In Minor Crimes To Bring About Restorative Justice***

*Journal of Legal Certainty and Justice Vol. 4 No. 1 p. 17-30*

*The purpose of sentencing has shifted from the theory of retaliation (retributive) to justice-based remedies (restorative justice). Restorative justice is a sentencing goal that is oriented towards the recovery of victims of criminal acts. In addition to focusing on victims, restorative justice also aims to seek the best solution for crime victims, and perpetrators, as well as the families of the perpetrators and the families of the victims. One of the mechanisms used to achieve restorative justice is penal mediation. This article will discuss about penal mediation as an alternative settlement of minor crimes. The method used in writing this article is a normative legal research method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are the need for written, clear and firm rules regarding penal mediation, and the application of penal mediation in minor crimes will bring benefits, namely preventing perpetrators from the negative impact of punishment, recovering victims, and supporting the realization of the principle of simplicity, speed and low cost. in the criminal justice process.*

**Keywords:** Restorative Justice; Penal Mediation; Criminal Cases

**Yudistira Rusydi**

**Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan**

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 h. 31-44

Negara Indonesia memiliki struktur organisasi dengan berbagai fungsi lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan yang biasa disebut dengan jabatan. Disamping penegakan keadilan tentunya tidak terlepas dari penyalahgunaan wewenang bagi pejabat negara. Artikel ini merupakan kajian konsep untuk menganalisa pertanggung jawaban pejabat negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan atas jabatannya dipandang dari perspektif hukum administrasi negara dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian artikel ini mengungkapkan bahwa upaya pejabat negara dalam melakukan penyalahgunaan wewenang tidak sejalan dengan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**Kata Kunci:** Pejabat Negara; Penyalahgunaan kewenangan; Pertanggungjawaban

**Yudistira Rusydi**

**Accountability of State Officials for Abuse of Authority**

*Journal of Legal Certainty and Justice* Vol. 4 No. 1 p. 31-44

*The Indonesian state has an organization structure with various functions of a detailed work environment in the overall relationship commonly referred to as the position. In addition to the enforcement of justice, of course, it is inseparable from the abuse of authority for state officials. This article is a concept study to analyze the responsibility of state officials who carry out acts of abuse of authority over their positions viewed from the perspective of state administrative law in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. The research method used in writing this article is normative juridical with a statutory approach (statue approach), namely Law No. 34 of 2014 concerning Government Administration. The results of this article's research reveal that the efforts of state officials in abusing authority are not in line with their functions based on Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration*

**Keywords:** State Officials; Abuse of authority; Accountability

**Erisa Ardika Prasada**

**Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia**

*Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 h. 45-54

Pengetahuan tradisional yang merupakan milik masyarakat, diwariskan secara turun-temurun perlu dilindungi karena adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh negara maju melalui *biopiracy* atau *misappropriation*. Artikel ini bertujuan untuk memeriksa perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional dari tindakan *biopiracy* atau *misappropriation* berdasarkan Undang-Undang Paten (UU Paten). Metode penelitian dalam penulisan merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional diatur dalam Pasal 26 UU Paten yaitu jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi, agar sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS). Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

**Kata kunci:** *Benefit Sharing*; Paten; Pengetahuan Tradisional

**Erisa Ardika Prasada**

**Legal Protection of Traditional Knowledge in Indonesian**

*Journal of Legal Certainty and Justice* Vol. 4 No. 1 p. 45-54

*Traditional knowledge which belongs to the community, passed down from generation to generation needs to be protected because of the potential for economic benefits resulting from the use of traditional knowledge by developed countries through biopiracy or misappropriation. This article aims to examine the legal protections for the community of traditional knowledge owners of biopiracy or misappropriation acts under the Patent Act (Patent Law). The research method in writing is normative research, namely legal research carried out by researching library materials. The approach method used in this research is the legal approach. The result of this research is that the legal protection of traditional knowledge is regulated in Article 26 of the Patent Law, namely if the invention is related to and/or derived from genetic resources and/or traditional knowledge, it must be stated clearly and correctly the origin of the genetic resources and/or traditional knowledge, mentioned in the description, so that genetic resources and/or traditional knowledge are not recognized by other countries and to support Access Benefit Sharing (ABS). The distribution of results and/or access to the use of genetic resources and/or traditional knowledge is carried out under the laws and regulations and international agreements in the field of genetic resources and traditional knowledge.*

**Keywords:** *Benefit Sharing*; Patent; Traditional Knowledge

**Edy Kastoro, Koesrin Nawawie A., Siti Mardiyati**

**Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 h. 55-64

Sebagai langkah korektif, sudah sepantasnya isu-isu administrasi pemerintahan di atas dikembalikan ke khitahnya. Terkait administrasi pemerintahan, kedua hal tersebut perlu diimplementasikan dalam UU Cipta Kerja, tujuannya adalah untuk menciptakan budaya birokrasi yang cepat, responsif, dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah normatif dengan pendekatan aturan perundang-undangan, penelitian ini berusaha mengungkapkan dampak Undang-Undang cipta kerja (*omnibus law*) apakah telah sejalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian artikel ini mengungkapkan bahwa; *Pertama*, ruang diskresi pejabat pemerintah harus dibatasi dengan syarat sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pelaksanaan putusan fiktif positif harus tetap melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci:** Administrasi Pemerintahan, *Omnibus Law*, UU Cipta Kerja

**Edy Kastoro, Koesrin Nawawie A., Siti Mardiyati**

***Impact of the Omnibus Law on Government Administration Law***

*Journal of Legal Certainty and Justice* Vol. 4 No. 1 p. 55-64

*As a corrective measure, it is appropriate for the above administrative issues of government to be returned to its khitah. Regarding government administration, these two things need to be implemented in the Job Creation Law if the goal is to create a bureaucratic culture that is fast, responsive, and responsible. The research method used in this article is normative with a statutory approach, this research seeks to reveal the impact of the omnibus law in line as stipulated in the Government Administration Law. The results of the research of this article reveal that; First, the discretionary space of government officials must be limited on the condition that it is in line with the provisions of laws and regulations. Second, the implementation of a positive fictitious judgment must still involve the State Administrative Court.*

**Keywords:** Government Administration, *Omnibus Law*, Job Creation Law

**Agustina Dua Osa, Gustav Gisele Nuwa, Abdul Muis Kasim**

**Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekeabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 h. 65-74

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimanakah implementasi hukum waris adat serta proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alat ukur pengambilan data menggunakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball sampling. *Sumber data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan 10 informan yang merupakan para tetua dan pengurus lembaga adat desa di beberapa desa yang berada di kabupaten Sikka.* Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa gambaran atau situasi kondisi mengenai implementasi hukum waris adat pada sistem kekeabatan patrilineal di Kabupaten Sikka dalam pembagian warisan tanah diberikan kuasa penuh kepada anak laki-laki sehingga besaran pembagiannya berbeda dengan anak perempuan sedangkan proses penyelesaian sengketa berdasarkan negosiasi setelah tidak ada penyelesaian maka dengan cara musyawarah untuk mendamaikan pihak berselisih oleh pihak Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa.

**Kata Kunci:** Eksistensi Hukum Waris; Hukum Waris Adat; Sistem Kekeabatan Patrilineal; Eksistensi Hukum Waris

**Agustina Dua Osa, Gustav Gisele Nuwa, Abdul Muis Kasim**

***The Existence of Customary Inheritance Law in the Patrilineal Kinship System in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province***

*Journal of Legal Certainty and Justice* Vol. 4 No. 1 p. 65-74

*This study aims to find out and explain how the implementation of customary inheritance law and the process of resolving inheritance disputes based on customary inheritance law in force in Sikka Regency. This research uses a qualitative approach method with data collection measuring tools using structured, semi-structured interviews, and observations. The technique used in this study was snowball sampling. The source of the data used was the primary data from interviews with 10 informants who were elders and administrators of village customary institutions in several villages in Sikka district. The results of this study revealed that the picture or situation of conditions regarding the implementation of customary inheritance law in the patrilineal kinship system in Sikka Regency in the division of land inheritance is given full power to the son so that the amount of the division is different from that of the perempuan child while the dispute resolution process is based on negotiations after there is no settlement, then by means of deliberation to reconcile the disputing parties by the Village Customary Institution and the Government Village.*

**Keywords:** *The Existence of Customary Inheritance, Customary Inheritance Law, Patrilineal System.*